



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8013-8024

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

E-Government Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan

Bonefasius Bao^{1✉}, PRT Paramma², Anitha Nurak³, Hendrik Vallen Ayomi⁴

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email : bonefasius0@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dunia seperti dilipat, manakala teknologi komunikasi dan informasi menjadi medium dan mantra sakti bagi berbagai kehidupan manusia. Dunia digital seperti menelanjangi kita, sebab bisa menyusup kemana-mana. Tulisan ini hendak dengan secara sederhana memberikan penjelasan dan atau gambaran mengenai peran teknologi digital dalam system pemerintahan. Metode penulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Data dihimpun dari berbagai sumber yang kompatibel dengan realitas kajian yang bisa berupa jurnal ilmiah, buku, gambar, dan sumber lain yang mendukung. Data dipilah dan dipilih untuk selanjutnya dianalisis dengan seksama sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa : (1) Partisipasi masyarakat dalam control system pemerintahan lebih mudah, (2) Keterbukaan pengelolaan pemerintahan menjadi lebih nyata sehingga kemungkinan untuk memberikan masukan dan kritik serta saran semakin gampang, (3) Tata kelola pemerintahan semakin akuntabel dan transparan karena dukungan teknologi yang bisa memberikan kecepatan akses.

Kata Kunci: *E-Government, Akuntabilitas, Pemerintahan, Sistem*

Abstract

The world is like folded, when communication and information technology becomes a medium and magic spell for various human lives. The digital world is like stripping us naked, because it can infiltrate everywhere. This article aims to simply provide an explanation and/or description of the role of digital technology in the government system. This writing method is qualitative with a literature review approach. Data is collected from various sources that are compatible with the reality of the study which can be in the form of scientific journals, books, images, and other supporting sources. Data is sorted and selected to be analyzed carefully according to the needs in answering questions. The results of the study found that: (1) Public participation in the government control system is easier, (2) Openness in government management becomes more real so that the possibility of providing input and criticism and suggestions is easier, (3) Governance is increasingly accountable and transparent because of the support of technology that can provide speed of access.

Keyword: *E-Government, Ability, Government, System*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik saat ini, memberikan makna mengenai penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang berkeadilan. Perubahan-perubahan yang telah dan sedang terjadi menuntut terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparansi dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah mampu memenuhi dua tuntutan masyarakat yang berkaitan erat yaitu masyarakat yang menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan ter- percaya serta masyarakat yang menginginkan agar aspirasi mereka didengar. Kedua tuntutan itu sangat berkaitan dengan akses informasi (Nurhakim, 2014).

Penggunaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi mulai meningkat dan menjalin interaksi masyarakat luas. Penggunaan teknologi terutama internet diterapkan untuk media sosial, kepentingan bisnis, dan lain-lain. Penerapan sistem daring membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat karena pengisian formulir secara online yang bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Teknologi informasi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, luas dalam penyebarannya, dan lama dalam penyimpanannya. Teknologi ditujukan untuk mengolah data demi mendapatkan informasi yang akurat, relevan, serta tepat waktu (Febryan et al., 2016).

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam mendeskripsikan sesuatu, seperti sebagai perantara, untuk mempresentasikan sesuatu kepada publik. Sehingga untuk mempermudah komunikasi dalam suatu desa antara aparat desa dengan warga dibutuhkan suatu media komunikasi, yaitu Website pemerintahan. Adanya website akan mempermudah aparat desa dalam mempresentasikan hasil kinerja ataupun produk – produk yang ada dalam desa tersebut. Selain itu penggunaan digital government akan mempermudah dalam pekerjaan. Di pemerintahan desa misalnya, SID atau system informasi desa akan mampu merubah data mentah menjadi suatu data yang berarti dan siap digunakan (Rozi et al., 2017).

Selanjutnya penggunaan SID sebagai teknologi untuk pengambil keputusan sudah banyak diterapkan diantaranya, untuk bidang pertanian , dalam dibidang keuangan , dalam pengambilan keputusan pada perbaikan komputer. Pengambilan keputusan dalam SID dapat juga ditambahkan untuk pengambilan keputusan dalam memprediksi cuaca ataupun pengambilan keputusan dalam mengelompokkan suatu dokumen. Namun yang paling penting dalam suatu Sistem Informasi adalah kemampuan sistem tersebut dalam pengambilan keputusan (Rozi et al., 2017).

Selanjutnya penelitian ini akan membahas bagaimana sesungguhnya teknologi digital akan memberikan bantuan fungsional kepada masyarakat. Dalam diskursus ini penggunaan teknologi digital akan kita lihat pada bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan ini menjadi hal yang sangat penting dalam tata kelola sistem pemerintahan di republik ini. Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan mengenai sistem digital, kelebihan yang dimiliki dan kemudian penerapannya dalam tata kelola pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Tiga jenis desain yang dikembangkan: kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Tidak diragukan lagi, ketiga pendekatan tersebut tidak berbeda seperti yang terlihat pada awalnya. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif tidak boleh dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan atau dikotomi; sebaliknya, keduanya mewakili ujung yang berbeda dalam sebuah kontinum (King, 1991). Metode penulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Penelitian kualitatif berusaha menangkap fenomena dan menjelaskannya dengan sudut pandang intelektual berdasarkan realitas empirik . Basis realitas ini menjadi penting sebab penelitian empiris , meskipun dengan data skunder asal muas data tersebut adalah fakta yang nyata (Cresswell, 2012). Selanjutnya data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dihimpun dari berbagai sumber yang kompatibel dengan realitas kajian. Adapun sumber sumber data yang dimaksudkan adalah sumber data yang bisa berupa jurnal ilmiah, buku, gambar, dan sumber lain yang mendukung. Data dipilah dan dipilih

untuk selanjutnya dianalisis dengan seksama sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai e-government merupakan salah satu topik yang terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade belakangan. Hal ini selaras dengan program-program pemerintah di hampir seluruh negara untuk mengadopsi ICT (Information and Communication Technology/Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam menjalankan pemerintahan. Investasi bernilai milyaran dolar pun dikucurkan untuk membiayai proyek e-government nasional dengan harapan bahwa e-government akan mampu mengadakan modernisasi dan efisiensi pada sistem pemerintahan dan birokrasi yang banyak terkendala oleh banyaknya patologi seperti red tape. Di satu sisi, kalangan akademisi beramai-ramai mempelajari, menganalisis dan mengevaluasi penerapan e-government di berbagai negara tersebut. Dari situ, kajian mengenai e-government perlahan tumbuh dan berkembang menjadi satu topik yang memiliki karakteristiknya sendiri. Namun sebelum kita melangkah jauh dalam menyelami kajian e-government, penting bagi kita untuk mengetahui konsep dasar dari objek yang ingin kita dalami. Oleh sebab itu, di bagian ini akan diulas mengenai konsep dasar dari e-government dan definisinya menurut para ahli(Irawan & Hidayat, 2021).

E-government adalah suatu istilah yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada pengguna jasa atau memberikan kepuasan maksimal. Definisi tersebut sejalan dengan rumusan Bank Dunia pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, e-government adalah penggunaan internet untuk

melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Laudon mengemukakan bahwa e-government mengacu kepada aplikasi internet dan teknologi jaringan untuk secara digital memungkinkan(Fahlefi et al., 2017).

Seiring dengan meningkatnya proses demokrasi, maka demokrasi juga merupakan aspek penting dalam proses governance. Demokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilannya dalam proses

pemerintahan. Antiroiko menjelaskan bahwa partisipasi dalam politik secara konvensional yaitu ikut serta dalam pemilihan umum atau menjadi anggota aktif dalam suatu partai, namun sekarang ini yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi tidak selalu berarti ikut serta secara langsung tetapi partisipasi merupakan suatu proses yang kontinyu mulai dari partisipasi yang paling rendah (non-partisipasi) dimana masyarakat mempunyai kesempatan untuk menerima informasi saja (misal informasi mengenai pemerintah), kemudian meningkat ke tahap yang lebih tinggi seperti berdiskusi mengenai isu politik, ikut serta dalam proses voting suatu referendum, ikut serta dalam organisasi masyarakat atau organisasi politik tertentu, sampai dengan hal yang paling ekstrim yaitu ikut serta secara langsung seperti mengontrol implementasi kebijakan pemerintahan(Nurhadryani, 2009).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek terpenting dari proses governance adalah banyaknya sektor yang terlibat dan saling berinteraksi dalam level yang sama maupun berbeda serta pentingnya proses demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan dengan cara meningkatkan kesempatan partisipasi semua sektor melalui distribusi informasi dan melakukan komunikasi. Pada bagian analisa dan pembahasan akan dibahas bagaimana peranan ICTs dalam proses governance yang kompleks tersebut yang merupakan inti dari konsepsi e-Governance (Nurhadryani, 2009).

Pembahasan mengenai e-government merupakan salah satu topik yang terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade belakangan. Hal ini selaras dengan program- program pemerintah di hampir seluruh negara untuk mengadopsi ICT (Information and Commuication Technology/Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam menjalankan pemerintahan. Investasi bernilai milyaran dolar pun dikucurkan untuk membiayai proyek e-government nasional dengan harapan bahwa e-government akan mampu mengadakan modernisasi dan efisiensi pada sistem pemerintahan dan birokrasi yang banyak terkendala oleh banyaknya patologi seperti red tape(Irawan & Hidayat, 2021).

Electronic Government atau *e-government* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan *e-government* ini. Penyampaian pelayanan kepada publik di dalam paradigma *e-government* tidak lagi dilakukan melalui dokumen-dokumen dan interaksi personal melainkan sudah dilakukan melalui elektronik sehingga tidak ada lagi interaksi personal di

dalam pemberian layanan. Orientasi efisiensi biaya produksi di dalam pemberian pelayanan pun bergeser kepada orientasi yang menekankan pada fleksibilitas, pengawasan dan kepuasan pengguna (Nurhakim, 2014).

Contoh dari penerapan e-govt adalah adanya situs-situs resmi lembaga pemerintah dan tersedianya pelayanan terpadu dengan sistem daring (online). Demi terjaganya manfaat dan tercapainya tujuan dari e-govt, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara cerdas dan profesional. Profesional dengan selalu mengutamakan terjadinya dialog yang baik dan cerdas dalam menjaga keamanan dari situs yang dikelola dari "kejahilan" para peretas (hackers) yang tidak bertanggung jawab dan tentu saja akan sangat mengganggu; baik bagi pemilik situs (website) dan masyarakat pengguna tentunya. Bahkan berdasarkan data Indonesia Cyber Security Report dari tahun belakangan ini terdapat belasan ribu situs telah diserang oleh kelompok peretas yang mengakibatkan terjadinya kebocoran data yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak hanya pengelola; sebagai pengguna cerdas, masyarakatpun perlu berhati-hati dan teliti saat mengakses situs apapun termasuk situs resmi pemerintah. Tentunya dengan memperhatikan jika ada keganjilan dalam tampilan maupun informasi yang disampaikan serta jangan ragu untuk melaporkan kepada yang berwenang. Demi kenyamanan bersama, bersama pula kita menjaga. Selamat datang di era pemerintahan elektronik.

Seiring dengan meningkatnya proses demokrasi, maka demokrasi juga merupakan aspek penting dalam proses governance. Demokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilannya dalam proses pemerintahan (Nooris, 2007; 164). Antiroiko menjelaskan bahwa partisipasi dalam politik secara konvensional yaitu ikut serta dalam pemilihan umum atau menjadi anggota aktif dalam suatu partai, namun sekarang ini yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi tidak selalu berarti ikut serta secara langsung tetapi partisipasi merupakan suatu proses yang kontinyu mulai dari partisipasi yang paling rendah (non-partisipasi) dimana masyarakat mempunyai kesempatan untuk menerima informasi saja (misal informasi mengenai pemerintahan), kemudian meningkat ke tahap yang lebih tinggi seperti berdiskusi mengenai isu politik, ikut serta dalam proses voting suatu referendum, ikut serta dalam organisasi masyarakat atau organisasi politik tertentu, sampai dengan hal yang paling ekstrim yaitu ikut serta secara langsung seperti mengontrol implementasi kebijakan pemerintahan (Nurhadryani, 2009).

Teori birokrasi representatif menyatakan bahwa interaksi antara warga negara dan negara dapat diuntungkan oleh kesamaan karakteristik demografis dan sosial antara birokrasi dan masyarakat. Ketika tenaga kerja birokrasi memiliki komposisi demografi dan

membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Selanjutnya yang nomor (6) adalah e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industry, (7) Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah⁸. Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-informasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date, (8) Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air, (9) Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya, (10) Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

Selain keuntungan atau manfaat bagi masyarakat, ada juga kerugiannya yakni : (1).Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker, (2). Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan, (3) Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini public, (4) Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi dalam system pemerintahan, (5) Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government, (6) Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian, (7) Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja di lingkungan pemerintah, kinerja internal dan layanan publik dapat terwujud dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi informasi pada suatu

organisasi merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem (Fahlefi et al., 2017).

Dalam penerapannya pada suatu organisasi, termasuk dalam birokrasi, sistem informasi merujuk kepada informasi mengenai anggota organisasi, tempat dan hal-hal penting lainnya di dalam organisasi atau di lingkungan sekelilingnya tersebut. Informasi merupakan data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Sebaliknya data merupakan sekumpulan fakta mentah (yang belum diolah / dikelola) yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi di dalam suatu organisasi sehingga belum dapat dipahami secara efektif oleh manusia. Secara teknis, pengaplikasian sistem informasi manajemen di dalam lingkungan organisasi dewasa ini tampak dari penggunaan sejumlah perangkat keras maupun perangkat lunak. Dipergunakannya alat-alat elektronik seperti komputer, printer, telepon, yang terus berkembang, mulai dari jaringan internet hingga nirkabel Wi-Fi berkecepatan tinggi, hingga sistem telepon dan kabel digital, terus-menerus mengubah cara orang bekerja di dalam kehidupan organisasi (Fahlefi et al., 2017).

Kendala Dalam E-Government

Kendala-kendala yang dihadapi Penerapan Teknologi Informasi Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data bagi pelayanan publik tentu menemukan sejumlah kendala atau hambatan. Berdasarkan informasi-informasi dari wawancara yang dilakukan terhadap para informan, dapat diketahui bahwa sejumlah kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi pada pengelolaan data bagi pelayanan publik yang diselenggarakan adalah kurangnya dukungan pendanaan atau anggaran dari Pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan SDM pengelola data (Fahlefi et al., 2017).

Pelayanan perijinan bagi masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah melalui pengelolaan data yang memanfaatkan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan berbagai perijinan. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan misalnya dimaksudkan untuk menghindari percaloan dan untuk melaksanakan optimalisasi pelayanan perijinan. Pemerintah memberikan pelayanan perijinan, yaitu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar. Penyelenggaraan pelayanan perijinan tersebut dilakukan dengan Pola Terpadu Satu Pintu mengandung arti bahwa kegiatan penyelenggaraan perijinan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan hingga tahap penerbitan dokumennya (Fahlefi et al., 2017).

Kualitas administrasi dapat dicirikan, antara lain, oleh seberapa efektif administrator publik menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

Pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan individu merupakan ciri penting dalam studi administrasi. Namun, apa yang mendorong kemampuan pengambilan keputusan? Dapatkah suatu konstruk digunakan sebagai panduan untuk kualitas pengambilan keputusan, dan dengan demikian kualitas kebijaksanaan? Meskipun motivasi dan keselarasan tujuan dari birokrat individu memainkan peran yang besar dan penting, para psikolog, ahli saraf, dan ahli kecerdasan buatan berpendapat bahwa kecerdasan adalah konstruk yang membantu mendefinisikan kapasitas keseluruhan untuk kualitas pengambilan keputusan (Bullock, 2019).

AI dapat dianggap sebagai kemampuan entitas nonorganik dan mekanis untuk mencapai tujuan yang kompleks. Entitas nonorganik dan mekanis untuk mencapai tujuan yang kompleks. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini menyiratkan bahwa kecerdasan tidak bergantung pada substrat: Kecerdasan dapat hadir sebagai proses biologis yang menginformasikan tindakan manusia atau sebagai proses mekanis yang memandu sebuah sistem otomatis. Literatur AI membedakan antara "lemah" atau "AI sempit" dan "kuat" atau "AI umum". AI yang lemah atau sempit dapat belajar untuk menyelesaikan sekumpulan kecil tugas atau satu tujuan yang sangat sulit. AI yang kuat atau umum dapat belajar di berbagai tugas kompleks yang menantang di hampir semua domain (Nilsson, 2009). Ada banyak diskusi tentang peningkatan kemampuan jaringan syaraf tiruan dalam dan jaringan syaraf tiruan generatif, tetapi untuk tujuan artikel ini, hal tersebut sudah cukup: AI sempit terus ditingkatkan dan semakin mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dulunya paling efektif, efisien, dan dapat diselesaikan secara adil oleh manusia (Bullock, 2019).

Don Tapscott, seorang pengamat dinamika teknologi informasi dan komunikasi Amerika Serikat, meyakini bahwa perkembangan ekonomi global sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis baja, kendaraan, dan jalan raya menuju dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer, dan jaringan. Dalam bukunya *The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, ia melihat bagaimana migrasi peradaban itu diperlukan. Lebih dari itu, para pemikir komunikasi kontemporer melihat bagaimana informasi semakin menjadi salah satu elemen konstitutif dalam pola pikir masyarakat. Pengamat seperti Straubhar, misalnya, melihat bagaimana masyarakat melakukan aktivitas ekonomi-politik melalui proses produksi, konsumsi, dan distribusi informasi (Setiawan & Padmaningrum, 2020).

Di sini, elemen informasi menjadi tidak mungkin dinegasikan begitu saja. Di Indonesia kontemporer, ada visualisasi jika masyarakat saat ini adalah masyarakat informasi. Masyarakat informasi ini dalam pandangan Straubhar adalah sebuah realitas yang ditandai dengan intensitas yang tinggi dari pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.

Dengan demikian informasi menjadi kebutuhan atau keperluan (hampir) pokok dan terwujud dalam metafora sebagai berikut: "informasi adalah darah kehidupan yang menopang keputusan politik, sosial dan bisnis". Jika diibaratkan darah, maka betapa pentingnya keberadaan informasi bagi kehidupan. Pemaknaan selanjutnya adalah tidak ada perspektif dalam menjalani kehidupan global ini tanpa kehadiran informasi. Oleh karena itu masyarakat harus membuka diri terhadap dinamika media baru atau new media dan tataran komunikasi trans-nasional. Sirkulasi produksi, konsumsi dan distribusi kiat informasi dan kiat petir yang kuat. Teknologi mendukung sendi-sendi interaksi (Setiawan & Padmaningrum, 2020).

Masalah yang jelas dalam memahami masyarakat informasi digital adalah sejauh mana definisi masyarakat informasi memiliki tempat dan porsi yang tepat dalam keseluruhan konteks pengembangan masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat informasi melekat pada setiap tahapan masyarakat yang ada. Adalah sebuah fakta bahwa setiap komunitas sosial memiliki kebutuhan dan tuntutan tindakan komunikatif-informatif. Hanya saja perkembangan dinamika sejarah kemanusiaan menempatkan komunikasi dalam konteks masyarakat informasi industri yang dipicu dan dibantu oleh teknologi yang mampu memampatkan keterbatasan ruang dan waktu. Sistem Informasi Desa memberikan kontribusi positif bagi komunikasi pemangku kepentingan dengan masyarakat desa. Kondisi geografis desa-desa di Indonesia yang tidak semuanya memiliki koneksi internet, membuat tidak semua desa dapat dibangun infrastruktur SID. Pemerataan infrastruktur komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan di Indonesia, untuk menjamin ketersediaan fasilitas bagi pengembangan Sistem Informasi Desa.

SIMPULAN

Masyarakat kita saat ini sedang mengalami fase evolusi dalam hal berorganisasi dan berkomunikasi. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah untuk selalu tanggap dan menyesuaikan dengan pola-pola dan kecenderungan baru yang akan selalu terjadi di masyarakat. Sehingga setiap perubahan yang terjadi ini harus diantisipasi dan difahami serta selanjutnya difasilitasi dengan bentuk penyediaan teknologi support system yakni e-government. Namun pada akhirnya yang terpenting adalah harus diperhatikan cara-cara pengawasannya. Sehingga bagaimanapun teknologi yang semakin maju, tetap yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana memenuhi kewajiban pelayanan publik dengan baik dan bagaimana Pemerintah mempertanggungjawabkannya dengan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bullock, J. B. (2019). Artificial Intelligence, Discretion, and Bureaucracy. *American Review of Public Administration*, 49(7), 751–761. <https://doi.org/10.1177/0275074019856123>
- Fahlefi, Z., Teknologi, P., Bagi, I., & Pelayanan, P. (2017). Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Bp2Tsp Kota Samarinda). *Jurnal Paradigma (JP)*, 3(2), 155–166. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/386>
- Gaozhao, D., Wright, J. E., & Gaaney, M. K. (2023). Bureaucrat or artificial intelligence: people's preferences and perceptions of government service. *Public Management Review*, January 2023. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2160488>
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). *E- Government : Konsep, Esensi dan Studi Kasus*.
- Nurhadryani, Y. (2009). *171988-ID-memahami-konsep-e-governance-serta-hubun*.
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi*, 9(3), 403–422.
- Setiawan, T., & Padmaningrum, D. (2020). Toward the Design of Village Information Systems As a Villager Communication Medium. ... *Journal of Multi ...*, 1(4), 1–6. <https://multisciencejournal.com/index.php/ijm/article/view/20>